

Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan *Local Leadership*¹

Qurrotul A'yuni² dan Dyah Retna Puspita³
Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Kebutuhan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengurai permasalahan atas tipologi birokrasi seperti pelayanan publik yang kurang memuaskan, dan korupsi yang semakin marak di Indonesia. Korupsi bahkan menjadi faktor yang krusial dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Korupsi tidak lagi hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi sudah menjalar ke tingkat pemerintahan daerah. Korupsi di daerah bahkan di duga lebih besar dan sudah masuk dalam lini satuan kerja perangkat daerah, yang notabene adalah pembantu Bupati selaku pemimpin daerah. Korupsi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merugikan keuangan negara. Di sisi lain, korupsi juga melanggar etika penyelenggaraan administrasi negara. Belajar dari kasus yang ada di beberapa negara, salah satu keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat tergantung pada penguatan *local leadership* (kepemimpinan lokal). Tanpa adanya *local leadership* akan menyebabkan gagalnya reformasi birokrasi. Sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama tergantung pada peran pimpinannya.

Kata Kunci: Etika Administrasi Negara, Korupsi Daerah, *Local Leadership*, Reformasi Birokrasi.

¹ Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, pada tanggal 10 Pebruari 2012.

² Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

³ Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

I. PENDAHULUAN

Keinginan dan harapan untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik bukan hal yang muluk bagi masyarakat secara umum. Perkembangan keilmuan ilmu administrasi negara berupaya mencari jalan keluar bagi peningkatan pelayanan publik, dari mulai *old public administration*, *new public management*, hingga *new public service* yang ketiganya merupakan paradigma ilmu administrasi negara yang dipetakan oleh Denhardt dan Denhardt. Tentu bukan hal mudah dalam mencapai pelayanan publik yang prima, sehingga masyarakat merasa puas dengan apa yang ditawarkan oleh organisasi publik. Sampai saat ini, tuntutan akan perbaikan pelayanan publik masih sering terdengar, khususnya keinginan untuk mereformasi birokrasi yang dituding oleh berbagai pihak masih jauh dari ideal dan cenderung mengabaikan kepentingan publik.

Bila disinggung mengenai upaya mereformasi birokrasi tentu bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang menyebabkan pentingnya perbaikan birokrasi atau lebih populer dikenal dengan istilah patologi birokrasi (penyakit birokrasi). Patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi (Risman K. Umar, 2002). Salah satu bentuk patologi birokrasi yang saat ini marak diberitakan yaitu korupsi, khususnya korupsi di daerah.

Beberapa kasus korupsi di daerah terus tumbuh menggurita, dan kasus tersebut melibatkan beberapa pejabat publik daerah. Seperti hasil penelitian yang dilaporkan oleh tim *Justice for The Poor Program*, Bank Dunia, yang melakukan Studi tentang Korupsi Pemerintahan di Tingkat Lokal (*Local Government Corruption Study/LGCS*) di 5 propinsi di Indonesia, sejak tahun 2006. Dari 10 kasus yang diteliti terdapat 2 kasus korupsi DPRD di tingkat propinsi yaitu korupsi DPRD Propinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat; 4 kasus korupsi DPRD di tingkat kabupaten yaitu korupsi DPRD Kabupaten Madiun, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Donggala; 4 kasus korupsi lembaga eksekutif di tingkat kabupaten yaitu: korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Mentawai, korupsi Bupati Kapuas Hulu, korupsi Bupati Blitar dan korupsi Panitia Pengadaan Tanah di Lombok Tengah.

Sedangkan tindak pidana korupsi yang terjadi di Jawa Tengah menurut Kapolda Jateng, pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010.

Tahun 2011 kepolisian telah menangani 78 kasus korupsi dengan 86 tersangka dan kerugian mencapai Rp34,6 miliar, sedangkan tahun 2010 jumlah kasus korupsi yang ditangani mencapai 32 kasus dengan 31 tersangka serta kerugian sebesar Rp23,6 miliar. dari 78 kasus korupsi yang ditangani bersama 35 Polres tersebut 22 kasus dalam tahap penyidikan, 23 kasus diteliti jaksa, dilimpahkan ke penuntutan sebanyak 30 kasus, dan tiga kasus dinyatakan ditutup dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan. (<http://www.antaraneews.com>, diakses pada Jum'at, 6 Januari 2012)

Data mengenai kasus tindak pidana korupsi di atas hanyalah sebagian data yang dapat penulis paparkan, tentulah masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang masih tersebar di beberapa daerah lainnya. Korupsi sangatlah merugikan banyak pihak, apalagi masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai permasalahan keuangan dan hukum, yang mereka harapkan hanyalah mereka hidup sejahtera dan menerima pelayanan yang baik dari pemerintah. Berikut beberapa dampak masif korupsi:

- a. Lesunya perekonomian
- b. Meningkatnya kemiskinan
- c. Tingginya kriminalitas
- d. Demoralisasi
- e. Kehancuran birokrasi
- f. Terganggunya sistem politik & pemerintah
- g. Buyarnya masa depan demokrasi
- h. Runtuhnya penegakan hukum (tim dosen mata kuliah anti korupsi Universitas Paramadina, 2011)

Dampak-dampak tersebut perlu diwaspadai dan dicarikan cara penyelesaiannya. Dalam tulisan ini penulis masih percaya bahwa mereformasi birokrasi yang telah lama melekat dalam tubuh organisasi publik yang ada di daerah masih menjadi alternatif bagi pengurangan korupsi, tetapi reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan, komitmen dan penguatan *local leadership* (kepemimpinan lokal).

Bagaimapun, pejabat publik atau pimpinan merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kesempatan membuktikan dirinya mampu mengurus dan mensejahterakan rakyatnya. Saat ini dibutuhkan pemimpin yang transformasional, yaitu pemimpin yang mendatangkan inovasi dan perubahan dengan menghargai

kebutuhan dan perhatian pengikutnya, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan misi, strategi, struktur dan kultur organisasi (Daft, 2006).

Seorang pemimpin harus mampu mengontrol dan membatasi dirinya atas kekuasaan yang dimilikinya sehingga tidak terjebak dan dikuasi oleh kekuasaan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton (1972) dalam Miriam Budiarto (1991), "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (Kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasaan yang absolut berkorupsi secara absolut pula) secara implisit menjelaskan hubungan bagaimana seseorang yang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasaannya. Manifestasinya dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

II. PEMBAHASAN

Hubungan korupsi di daerah, kebutuhan akan perbaikan birokrasi hingga kebutuhan akan penguatan *local leadership* merupakan bahasan utama dalam tulisan ini, ketiganya masih menjadi topik yang kerap dibicarakan dan didiskusikan oleh khlayak umum baik para akademisi, pejabat daerah hingga masyarakat luas. Munculnya pemberitaan di media massa mengenai beberapa isu korupsi menambah banyaknya bahan tulisan mengenai permasalahan korupsi ini, ditambah dengan munculnya sosok-sosok muda yang kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi serta menyatu dengan perkembangan zaman serta teknologi menjadikan harapan akan pemimpin masa depan yang mampu memimpin dengan adil, jujur, serta membawa perubahan kearah yang lebih baik dan menjadi teladan bagi bawahannya.

A. Korupsi dan Etika Penyelenggaraan Administrasi Negara

Definisi korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yaitu busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kasus korupsi yang semakin marak, tidak seutuhnya disalahkan pada level individu atau bawahan yang melakukan tindak korupsi tersebut akan tetapi pada level atasan pun perlu ditindaklanjuti. Karena banyaknya korupsi di Indonesia khususnya daerah, pimpinan mengetahui tindak korupsi yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM.

"Ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh para PNS, mereka melakukannya tidak sendirian. Kita harus paham betul mekanisme administrasi pemerintahan. Kalau di administrasi pemerintahan itu, untuk mengeksekusi sebuah kebijakan atau program, itu dibutuhkan keputusan yang lebih tinggi" (<http://www.kbr68h.com>, diakses pada: 27 Desember 2011).

Korupsi dilihat dari segi etika penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sangatlah tidak etis dan melanggar hak-hak orang lain. Perlu adanya kontrol yang baik dalam upaya pemenuhan dan kesadaran akan beretika dalam menjalankan tugas-tugas sebagai sosok abdi negara, pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat. Untuk tetap fokus pada tugas-tugas dan terhindar dari hal-hal yang menyimpang tersebut perlu adanya sosok pemimpin yang mampu mengendalikan, mengatur dan menjaga bawahannya supaya tidak terjerumus dalam lingkaran korupsi dan penyelewengan dana atau anggaran. Sosok pemimpin lokal yang ideal menjadi harapan akan terbebasnya masyarakat dari kata korupsi.

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk.

Etika menurut Bertens (1977) adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika sebagai prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi

(Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi.

Tentu bukan hal yang mudah melakukan tindakan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai etis, sedangkan disekeliling kita mencoba menarik kita kedalam jalur yang tidak etis. Hal inilah yang menjadikan korupsi seperti terlapisi lapisan yang sangat rapat, mereka saling melindungi antara satu anggota dengan anggotanya yang lain, sehingga korupsi cenderung menahun dan awet. Pemaparan mengenai sebab, dampak, dan kerugian dari tindak pidana korupsi telah banyak dipaparkan oleh praktisi hukum atau pun akademisi, akan tetapi korupsi seperti masih enggan menjauh dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan tindakan yang sistematis untuk mengurangi korupsi, dukungan dari pimpinan, tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri, serta penegakan hukum yang netral amat diperlukan.

B. Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan *Local Leadership*

Bila kita mendengar kata birokrasi pastilah kita akan langsung ingat dengan salah satu tokoh yang cukup populer dari bidang ilmu sosiologi yaitu Max Webber, pengaruh birokrasi yang dibawa oleh Webber begitu cepat dan berperan besar dalam perkembangan proses administrasi. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan mengoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Peter Al Blau & Charles H. Page dalam Bintoro, 1987).

Tipe ideal birokrasi yang dibawa Webber dianggap cocok dengan kondisi organisasi yang tumbuh pada saat itu, namun setelah berabad-abad lamanya, birokrasi yang dicetuskannya dianggap oleh sebagian pihak tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Dimana, kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat dan tidak berbelit-belit menjadi prioritas utama dalam bidang pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia.

Menurut Eko Prasjojo (2003) dalam Teguh Kurniawan (2007) terdapat setidaknya dua titik kritis terhadap birokrasi Weberian, yaitu *pertama*, dalam

hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan; *kedua*, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat. Peningkatan intensitas dianggap memiliki resiko di mana pada akhirnya akan menyebabkan intervensi negara yang akan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat mahal.

Keinginan untuk mereformasi birokrasi merupakan hasil akumulasi dari berbagai kritik dan berkembangnya patologi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab
2. Pengaburan masalah
3. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Indikasi mempertahankan status quo
5. *Empire building* (membina kerajaan)
6. Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko
7. Ketidakpedulian pada kritik dan saran
8. Takut mengambil keputusan
9. Kurangnya kreativitas dan eksperimen
10. Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif
11. Minimnya pengetahuan dan keterampilan (Sondang P. Siagian, 1988)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia yaitu aparatur.

Peranan aparatur dalam birokrasi pemerintahan sebagai unsur pembaharu harus memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaharuan dan pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga kemampuannya untuk melihat saling berkaitan dari berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya (Lijan Poltak Sinambela, dkk., 2010)

Penguatan kepemimpinan lokal dalam upaya membangun dan melaksanakan reformasi birokrasi menjadi salah satu jalan keluar untuk

mengurangi dampak dari patologi birokrasi serta dampak masif dari korupsi. Kepemimpinan lokal disini bukan hanya berfokus pada kepala daerah saja, akan tetapi pimpinan pada jabatan publik daerah lainnya. Karena mereka memiliki nilai akuntabilitas yang sama kepada masyarakat luas. Sama-sama bertanggung jawab mensejahterakan rakyat, melindungi, membawa perubahan, dan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Salah satu konsep kepemimpinan dipaparkan oleh Joseph C. Rost (2004) yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tersebut tergantung pada *power* atau kekuasaan yang ada pada diri pemimpin. Kekuasaan tersebut dapat bersumber dari: (1) *coercive power* (daya paksa); (2) *reward power* (kemampuan memberi imbalan); (3) *legitimate power* (pengakuan yang sah); (4) *expert power* (keahlian); (5) *referent power* (daya tarik/kharisma). (Gibson, et al., 1984; Daft, 2006 dalam AG. Subarsono, 2006).

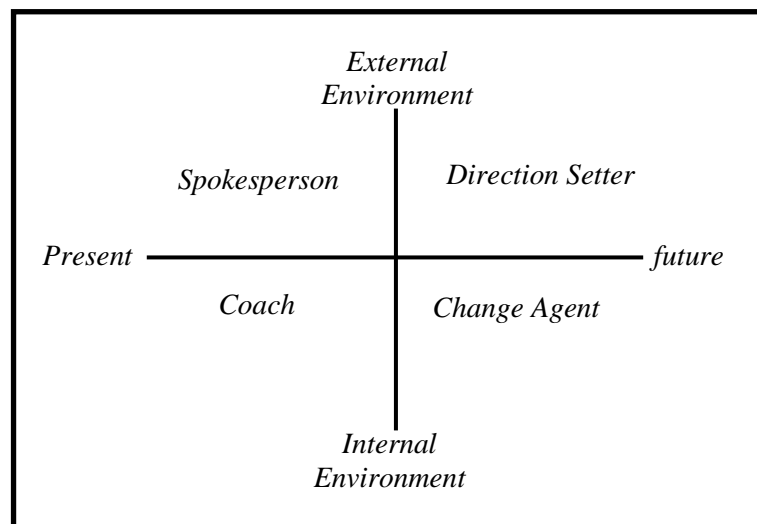
Pembedaan mengenai seorang pemimpin kerap terjadi, Warren Bennis dalam Nanus (1992) menyatakan bahwa seorang pemimpin berbeda dengan manajer yang hanya menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Kemudian Sunindhia dan Nunik Widyanti (1988) menyatakan perbedaan seorang kepala dengan pemimpin, seorang kepala bertindak sebagai penguasa dan pemimpin berperan sebagai pencetus ide-ide, organisator dan koordinator. Kemudian ada yang mengungkapkan pula bahwa seorang pimpinan belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat atau pun jabatan seseorang, akan tetapi kepemimpinan lahir dari proses internal (*leadership from the inside out*).

Pada prinsipnya, pembedaan tersebut upaya mencari jati diri seorang pemimpin yang ideal bagi bawahan, pengikut dan masyarakat yang dipimpinnya, serta memiliki kelebihan-kelebihan yang diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan amanah, bermartabat dan tidak menghambat hak-hak rakyat. Dalam tulisan ini, tentunya pemimpin-pemimpin dalam jabatan lokal

atau daerah yang diharapkan menjadi pemimpin ideal dan memiliki kelebihan-kelebihan tersebut.

Sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama tergantung pada peran anggota pimpinannya, apakah mereka mampu mengendalikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien atau tidak. Salah satu peran pemimpin jabatan lokal adalah mampu menempatkan dirinya dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam kaitannya dengan dimensi waktu sekarang dan waktu yang akan datang, dan dimensi lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi, maka peran pemimpin dapat dipetakan sebagai berikut:

Gambar 1.
Peran Pemimpin



Sumber: Nanus (1992) dalam AG. Subarsono (2006)

a. *Direction Setter*

Pemimpin harus mampu menyeleksi dan mengartikulasikan berbagai informasi dari lingkungan eksternalnya dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Pengenalan akan karakteristik masyarakat yang akan dipimpinnya, kecenderungan perkembangan teknologi yang terjadi, dan berbagai tantangan yang akan dihadapi adalah bentuk fenomena lingkungan eksternal yang perlu dikaji oleh seorang pemimpin agar pemimpin dapat merespon dengan kebijakan yang tepat.

b. *Change Agent*

Seorang pemimpin dapat berfungsi sebagai agen perubahan di dalam lingkungan internalnya. Sebagai contoh, pemimpin dapat melakukan reformasi terhadap manajemen personalia, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan melakukan perbaikan berbagai fasilitas organisasi yang mempermudah organisasi mengejar tujuannya. Agen perubahan yang baik adalah agen yang mampu mengantisipasi perkembangan di luar organisasinya,

membuka akses untuk perubahan organisasinya, membuat skala prioritas perubahan, dan melakukan pemberdayaan anggota organisasi untuk mampu melakukan perubahan.

c. Spokesperson

Pemimpin harus memiliki keterampilan sebagai juru bicara dan pendengar yang baik, yang berhubungan dengan visi organisasi. Pemimpin harus mampu menjalankan visi organisasi kepada pengikutnya, meyakinkan, dan mengajak mereka untuk memberikan dukungan. Menjadi juru bicara yang baik bagi pemimpin berarti mampu menjadi negosiator dan mampu membangun *network* dengan pihak di luar organisasinya bagi kepentingan organisasinya.

d. Coach

Pemimpin berperan untuk melakukan pemberdayaan bagi individu dalam organisasi. Menjadi *coach* yang baik bagi pemimpin berarti mampu menjelaskan kepada pengikutnya, di mana kondisi organisasi sekarang, alat apa yang dapat digunakan untuk mencapai visi organisasi, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Pemimpin harus memiliki perhatian pada keberhasilan tiap anggota organisasi, menghargai mereka, membangun kepercayaan, membantu mereka untuk belajar dan berkembang, dan mengajar mereka bagaimana memperbaiki kemampuannya untuk mencapai visi organisasi.

Sondang P. Siagian (1983) dalam Sinambela (2010) mengungkapkan untuk mendukung perilaku kepemimpinan dan mentransfer ide-ide dari atasan ke bawahan dibutuhkan *character building* (pembinaan karakter), yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional
2. Mengembangkan kemampuan analitik
3. Mengembangkan kepekaan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat pada umumnya
4. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai etika
5. Menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai estetika
6. Mewujudkan kemampuan untuk mampu mandiri
7. Meningkatkan kemampuan untuk menjadi warga masyarakat yang bukan saja terhormat, akan tetapi memiliki solidaritas sosial yang tinggi
8. Menumbuhkan dan memelihara perilaku sosial yang akseptabel bagi warga masyarakat lainnya
9. Mewujudkan persepsi yang tepat tentang peranan dan kedudukan seseorang *vis a vis* orang lain dalam kehidupan komunal.
10. Menumbuhkan kesadaran yang tebal tentang pentingnya kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka membina kehidupan yang nikmat, baik dalam arti kesejahteraan fisik maupun dalam arti kebahagiaan mental spiritual.

Penguatan kepemimpinan lokal yang ideal masih menjadi harapan dalam upaya membangun dan melaksanakan reformasi birokrasi. Sifat-sifat pemimpin lokal seperti yang telah dipaparkan di atas diharapkan dapat membawa perubahan

yang signifikan, bukan hanya sebagai wacana belaka. Bahkan bukan hanya angan-angan, tetapi ada tindak lanjut yang senyatanya. Tentu untuk mencapai tahap pimpinan atau pejabat publik lokal yang ideal tidak dapat diperoleh secara instan, akan tetapi melalui proses dan kesadaran yang tumbuh seiring berjalannya waktu.

Disisi lain, bagi masyarakat yang memiliki hak pilih harus pintar-pintar memilih pemimpin lokal. Karena bagaimanapun seorang pemimpin akan menjadi atasan mereka, yang akan mengatur mereka, dan memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan publik.

III. KESIMPULAN

Salah satu bentuk patologi birokrasi yang sering diberitakan oleh media yang marak akhir-akhir ini yaitu tindak pidana korupsi, korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta merugikan keuangan negara. Banyak kasus-kasus korupsi yang menelan keuangan negara hingga miliaran rupiah, tetapi belum ada penyelesaian yang tepat hingga ke akar-akarnya.

Salah satu cara untuk memutus rantai korupsi yaitu dengan berupaya mereformasi birokrasi. Birokrasi yang saat ini berkembang di Indonesia dianggap tidak cocok lagi, sehingga perlu adanya perbaikan. Menurut Eko Prasajo (2003) terdapat dua titik kritis terhadap birokrasi Weberian, yaitu *pertama*, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan; *kedua*, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia yaitu aparatur.

Reformasi akan berjalan dengan semestinya apabila ada dukungan dari pimpinan atau pejabat publik lokal itu sendiri. Sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama tergantung

pada peran anggota pimpinannya, apakah mereka mampu mengendalikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien atau tidak. Peran seorang pemimpin akan mampu memberikan perubahan atas organisasi itu sendiri, dimana peranan tersebut yaitu:

- 1) *Direction Setter*
Pemimpin harus mampu menyeleksi dan mengartikulasikan berbagai informasi dari lingkungan eksternalnya dalam usahanya mencapai tujuan organisasi.
- 2) *Change Agent*
Seorang pemimpin dapat berfungsi sebagai agen perubahan di dalam lingkungan internalnya
- 3) *Spokesperson*
Pemimpin harus memiliki keterampilan sebagai juru bicara dan pendengar yang baik, yang berhubungan dengan visi organisasi
- 4) *Coach*
Pemimpin berperan untuk melakukan pemberdayaan bagi individu dalam organisasi.

Disamping itu, seorang pemimpin juga harus mampu mengontrol dan membatasi dirinya atas kekuasaan yang dimilikinya sehingga tidak terjebak dan dikuasi oleh kekuasaan tersebut, karena kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasaan yang absolut berkorupsi secara absolut pula.

IV. REFERENSI

- Bertens, K. 2005. *Etika*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2001. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Etika Birokrasi Dalam Administrasi Pembangunan (Tantangan Menghadapi Era Globalisasi)*. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-41 FISIPOL UGM yogyakarta 19 September 1996.

- Kurniawan, Teguh. *Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: dari perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance*. JIAN Jurnal Ilmu Administrasi Negara UGM. Volume 7, 1 Januari 2007, hal 52-70.
- Nanus, B. 1992. *Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*. Jossey-Bass Publishers: Sanfransisco.
- Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan . *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Disampaikan Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia. Banjarmasin. 22-25 Juli 2008.
- Rinaldi, Taufik, dkk. Mei 2007. *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi (Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah)*. Laporan Tim Justice for The poor Program, Social Development Unit, Bank Dunia.
- Rost, Joseph C. 2004. *Kepemimpinan*. Terj. Triantoro Safaria. Graha Ilmu: Jakarta.
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti. 1988. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*. PT Bina Aksara: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1983. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.
- Subarsono, AG. *Sosok Pemimpin Sipil Lokal Masa Depan*. JIAN Jurnal Ilmu Administrasi Negara UGM. Vol 1. No. 1, Maret 2006, hal 23-34.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta.
- <http://netsains.com/2009/05/mengapa-dibutuhkan-pemimpin-lokal-berwawasan-global-menjawab-pembangunan-indonesia-2019/>. Diakses pada Sabtu, 17 Desember 2011.
- <http://www.jpnn.com/read/2011/10/28/106834/KPK-Awasi-Penanganan-18-Kasus-Korupsi-di-Daerah-> diakses pada: Sabtu, 17 Desember 2011.
- <http://www.antaraneews.com/korupsi-di-jateng-meningkat>. diakses pada: Jum'at, 6 Januari 2012
- <http://www.kbr68h.com>. *Keterlibatan pimpinan dalam korupsi* diakses pada: Selasa, 27 Desember 2011.